



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDANG SURYANA SOMA**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA**
3. NHK : **1001995**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.481.224.000
1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI	Rp.	75.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI	Rp.	262.050.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI	Rp.	550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 7 m2/5 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI	Rp.	594.174.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	458.800.000
1. MOTOR, YAMAHA NMAX BEBEK Tahun 2020, HASIL SENDIRI	Rp.	23.800.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	245.000.000
3. MOBIL, SUZUKI XL 7 Tahun 2023, HASIL SENDIRI	Rp.	190.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	66.288.393
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	164.135.189
F. HARTA LAINNYA	Rp.	200.080.000
Sub Total	Rp.	2.370.527.582



III. HUTANG

Rp. 553.246.542

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.817.281.040

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.